

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas *Peraturan Menteri Dalam Negeri* Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 722.400.000,00 atau 107,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp 670.000.000,00 dan realisasi Belanja adalah sebesar Rp 5.847.254.161,00 atau 89,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 7.533.582.695 ,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2017. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp. 22.646.019.082.05 dan setelah di hitung nilai penyusutannnya sebesar Rp-4.977.053.522,12. maka Aset Tetap Menjadi Rp. 23. 727.295.947,00 dan ekuitas dana sebesar Rp. 22,581,276,701.05

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2017 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Januari 2018

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALTENG DI JAKARTA,**

**SAWUN,S.Sos,M.si
Pembina
NIP.19700101 199305 1 021**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	4
Pernyataan Tanggung jawab	5
Ringkasan	6
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan)	8
Neraca (perbandingan)	9
Catatan atas Laporan Keuangan	10
Bab I Pendahuluan	10
A Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan	10
B Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	11
C Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	13
Bab II Profil organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD	14
A Profil organisasi	14
B Kebijakan keuangan	17
C Indikator pencapaian target kinerja APBD	19
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	27
A Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	27
B Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	40
Bab IV Kebijakan Akuntansi	41
A Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	41
B Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	41
C Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	44
D Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	61
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan	63
A Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	63
1. Pendapatan	63
2. Belanja	63
3. Aset	77
4. Kewajiban	89
5. Ekuitas Dana	89
4. Beban	89
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	90
Bab VII Penutup	91

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan

1. Pendapatan	a. Pendapatan Asli Daerah
2. Belanja	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang dan Jasa
	c. Belanja Modal
3. Aset	a. Aset lancar
	1) Kas di Bendahara Penerimaan
	2) Kas di Bendahara Pengeluaran
	3) Piutang Lain-lain
	4) Persediaan
	b. Aset Tetap
	1) Tanah
	2) Peralatan dan Mesin
	3) Gedung dan Bangunan
	4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
	5) Aset Tetap Lainnya
	c. Aset Lainnya
5. Kewajiban	1 Kewajiban Jangka Pendek
	2 Kewajiban Jangka Panjang
6. Ekuitas Dana	1 Ekuitas Dana Lancar
	2 Ekuitas Dana Investasi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2017 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2018

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALTENG DI JAKARTA,**

**SAWUN,S.Sos,M.Si
Pembina
NIP.19700101 199305 1 021**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur belanja, selama periode (1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017). Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 722.400.000,00 atau mencapai 100,82% persen dari target pendapatan PAD sebesar Rp.670.000.000,00. Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.847.254.161,00 mencapai 85% persen dari anggarannya sebesar Rp. 7.533.582.695,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan tahun 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Tahun 2017		Tahun 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	670,000,000.00	722,400,000.00	650,000,000.00	633,150,000.00
Belanja	7,533,582,695.00	5,847,254,161.00	4,167,761,000.00	4,105,120,018.00

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Ringkasan Laporan Operasional tahun 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

N O	URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah		-	-	-
5	Pendapatan Retribusi Daerah	722.400.000,00	633.150.000,00	89.250.000,00,	14.10
7	Lain-lain PAD yang Sah	-		-	

							100
8			JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d 7)	722.400.000,00	633.150.000,00	89.250.000,00	14.10
9							-

10	BEBAN						-
11	BEBAN OPERASI			7.346.253.980,50	4.888.450.294,90	2.457.803.685,60	50.28
12		Beban Pegawai		2.634.234.883	486.619.975,00	2.147.614.908,00	441.33
13		Beban Barang/ Jasa		3.061.113.159,50	2.772.283.547,83	288.829.611,67	10.42
14		Beban Bunga		-		-	-
15		Beban Subsidi		-		-	-
16		Beban Hibah		-		-	-
17		Beban Bantuan Sosial		-		-	-
18		Beban Penyusutan dan amortisasi		1.650.905.938,00	1.628.629.172,07	22.276.765,93	1.37
19		Beban Penyisihan Piutang		-		-	-
19		Beban Lain-lain			917.600	917.600,00	100
21				6.623.853.980,50	4.255.300.294,90	2.368.553.685,60	55.66
22					4.216.655.487,83	982.818.894,82	27,02

Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan operasional adalah Sebesar **Rp. 722.400.000,00** sedangkan Beban operasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. **670.000.000,00** yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp **2.634.234.883,00** dan Beban barang dan jasa sebesar Rp **3.061.113.159,50**,Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.**1.650.905.938,00** dan Beban Lain-lain sebesar Rp. **0,00** sehingga terdapat Defisit-Lo sebesar Rp. **2.457.803.685,60**

1. Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 722.400.000,00 ,Sedangkan Pendapatan Penerimaan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 633.150.000,00.

2. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2017 berjumlah Rp . 7.346.253.980.50 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 2.634.234.883,**00** dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.061.113.159,50 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1650.905.938.00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp. 0,00 sedangkan beban operasi tahun 2016 adalah sebesar Rp

4.888.450.294,90 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun%
1	Beban Pegawai- Lo	7.346.253.980.50	4.888.450.294.90	2.457.803.685.60	50.28
2	Beban Barang dan Jasa	2.634.234.883.00	486.619.975.00	2.147.614.908.00	441.33
	Beban Persediaan	0.00	0,00	0,00	0,00
	Beban Lainlain	0,00	917.600	917.600	-1,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.650.905.938.00	1.628.629.172.07	22.276.765.93	1.37
	Jumlah Beban LO	6.623.853.980.50	4.255.300.294.90	2.368.553.685.60	55.66

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp 22,646,019,082.05.yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 7.273.500,00 Aset Tetap sebesar Rp 13,839,879.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp 309,084,322.93

Sementara itu jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana adalah sebesar Rp **22,646,019,082.05** terdiri dari Kewajiban adalah sebesar Rp. 64,742,381.00,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp 22,581,276,701.05

Ringkasan neraca per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31- Desember-17	31-Des-16	Kenaikan/ (penurunan)
Aset			
- Aset lancar	7.273.500,00	63.362.882,50	312. 350.350
- Aset tetap	22.323.094.880,00	23.727.295.947,00	102069588
- Aset lainnya	348.053.505,00	148.403.505,00	0
Jumlah Aset	22.671.148.385,00	23.939.062.334,50	210280962,33
Kewajiban	3.471.970.018,00	3.563.331.368	
Ekuitas Dana	20.443.466.358,50	21.122.214.292,33	
- Ekuitas dana lancar	-		
- Ekuitas Dana Investasi	-		
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	23.939.062.334,50	24.685.545.660,33	

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2017:

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2017 dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	Ekuitas Awal	22,581,276,701.05	23,876,471,986.10
2	Surplus/Defisit-LO	6,623,853,980.50	4,255,300,294.90
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
5	Swelish Revaluasi Aset Tetap	-	-

Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas tahun 2017 Rp 23.876.471.986,10 sedangkan Ekuitas Akhir tahun 2017 adalah Rp 22.581.276.701.05 ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 203.840.534.45 .Sedangkan ekuitas tahun 2016 adalah sebesar Rp . 7.0727.270.312.90

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA Perbandingan)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

URUT	U R A I A N	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	(Rp)
1	PENDAPATAN	670,000,000.00	722,400,000.00	0	0	633,150,000.00
2	BELANJA	7,533,582,695.00	5,847,254,161.00	1,686,328,534.00	22.38	4,105,120,018.00
2.1	BELANJA OPERASI	7,264,361,695.00	564,708,616.00	6,699,653,079.00	92.23	3,320,424,018.00
2.1.1	Belanja Pegawai	3,491,626,695.00	2,634,234,883.00	857,391,812.00	24.56	486,619,975.00
2.1.2	Belanja Barang	3,772,735,000.00	2,970,473,733.00	802,261,267.00	21.26	2,833,804,043.00
2.2	BELANJA MODAL	269,221,000.00	242,545,545.00	26,675,455.00	9.91	784,696,000.00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	269,221,000.00	242,545,545.00	26,675,455.00	9.91	784,696,000.00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringannya	0		0	0.00	
	SURPLUS (DEFISIT)	6,863,582,695.00	5,124,854,161.00	-1,686,328,534.00	-24.57	3,470,970,018.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA)		6,863,582,695.00	5,124,854,161.00	-1,686,328,534.00	-24.57	3,470,970,018.00

NERACA (Perbandingan)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN TAHUN 2016

URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Kenaikan / Penurunan	
ASET				
ASET LANCAR	13.839.879	63.362.882,50		
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00		
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Investasi Jangka Pendek				
Piutang				
Piutang Retribusi				
Beban bayar dimuka	6.566.379.00	14.347.582,50		
Piutang Lain-lain				
Persediaan	7.273.500,00	49.015.300		
Jumlah	13.839.879.00	63.362.882,50		
ASET TETAP				
Tanah	4.290.000.000,00	4.290.000.000,00		
Peralatan dan Mesin	7.978.287.731,12	7.735.742.186,12		
Gedung dan Bangunan	15.448.067.408,00	15.448.067.408,00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.215.199.875,00	1.215.199.875,00		
Aset Tetap Lainnya	15.340.000,00	15.340.000,00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			
Akumulasi Penyusutan	6.623.800.134,12	4.981.208.105,45		
Jumlah ASET TETAP	22.323.094.880,00	23.727.295.947,00		
ASET LAINNYA	309.084.322.93	113.593.697.93		
Tagihan Penjualan Angsuran				
Lain-lain Aset				
Jumlah	348.053.505,00	148.403.505,00		
JUMLAH ASET	22.646.019.082 05	23.900.097.944.10 05		
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.471.970.018,00		
Utang Beban	64.742.381.00	23.625.958,00-		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Uang Muka dari Kas Daerah		0,00		

Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00 0,00		
Jumlah		3.495.595.976,00		
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	22.581.276.701.05	23.876.471.986.10		
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Uang Muka dari Kas Daerah				
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran kewajiban pihak ketiga				
Jumlah		23.625.958.00		
	22.581.276.701.05			
Ekuitas Dana Investasi				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Jumlah				
Jumlah Ekuitas Dana				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	22.646.019.082.05	23.900.097.944.10		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.

4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Penghubung Tahun 2017 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

C. SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- A. Profil Organisasi
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa

- c. Belanja Modal
- 3. Aset
 - a. Aset Lancar
 - b. Aset Tetap
 - c. Aset Lain-lain
- 4. Kewajiban
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
- 5. Ekuitas Dana
 - a. Ekuitas Dana Lancar
 - b. Ekuitas Dana Investasi
- 6. Beban

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. PROFIL ORGANISASI

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya, menyelenggarakan pelayanan protokoler, promosi daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, menyelenggarakan fungsi :

- a. Memfasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya;
- b. Melaksanakan pelayanan protokoler pejabat Pemerintahan Daerah dan tamu Daerah di Jakarta ;
- c. Memfasilitasi kegiatan promosi dan Informasi Daerah ;
- d. Memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya ;
- e. Menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya ;dan
- f. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan kantor.

Susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, terdiri dari :

Kepala Badan membawahi 4 (empat) sub unit eselon IV.a yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, tatalaksana analisis jabatan dan formasi jabatan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan surat menyurat dan rumah tangga Kantor.

2. Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian

Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan dan penyusunan rencana/program, melakukan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan rencana/program dan pelaporan.

3. Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga

Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi hubungan antar pemerintah daerah dengan pemerintah dan lembaga pemerintah non departemen dan swasta serta menjalin kerjasama dengan masyarakat daerah Kalimantan Tengah di Jakarta.

4. Kasubbag Komunikasi, Promosi dan Informasi

Kasubbag Komunikasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata dan bekerjasama dengan Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah serta Kabupaten guna mengumpulkan dan mengolah data atau informasi.

KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita. Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan

disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2016 - 2021 yaitu :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi.
2. Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.
6. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
7. Penanganan Bencana, Penanggulangan Resiko Bencana dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.
8. Pelestarian Lingkungan Hidup.
9. Percepatan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya

Kesembilan prioritas pembangunan daerah tersebut diatas merupakan manifestasi untuk mewujudkan visi jangka menengah dan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka pencapaian visi daerah yang merupakan perwujudan riil dari tujuan pembangunan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mempertimbangkan kemajuan perkiraan yang dicapai dalam tahun 2017, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi dan dipecahkan pada tahun 2017, maka penjabaran lebih lanjut dari prioritas pembangunan daerah tahun 2017 tersebut harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang, lintas wilayah, lintas pemerintahan maupun lintas pembiayaan.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, kami tampilkan pencapaian target kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebagai berikut :

**PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA TAHUN 2017**

No.	Nama Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Keuangan (%)	Realisasi Kinerja Keuangan (%)	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi Keuangan (Rp.)	Jumlah Sisa Anggaran (Rp.)	Ket.
1.	Belanja Tidak Langsung								
	1.1	Belanja Pegawai	• Gaji dan Tunjangan	100	37,20	1.424.212.695	1.124.645.763,	299.566.932,	
			• Tambahan Penghasilan PNS	100	0,00	1.475.850.000,00	932.425.000,00	543.425.000,00	
2.	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Belanja Paket/Pengiriman	100	33,14	75.000.000	15.617.105,00	59.382.895,	
	2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	• Belanja Telepon	100	24,56	127.200.000	33.345.189,00	93.854.811	
			• Belanja Air	100	13,00	10.800.000	1.665.496,00	9.134.504	
			• Belanja Listrik	100	88,69	194.000.000,0	191470.232,00	2.529.768,0	
	2.3	Penyediaan jasa jaminan barang	• Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	100	87,91	100.000.000,0	69,343.258,00	30.656.742	
		milik daerah							

	2.4	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	• Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	100	98,79	66.720.000	60.120.000	6.600.000	
			• Belanja Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	100	98,79	521.844.000,00	476.269.120,00	45.574.880,-	
	2.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100	100,00	70.000.000	69.984.000	16.000,-	
	2.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Belanja Alat Tulis Kantor	100	99,98	60.000.000	59.560.000,-	440.000,-	
	2.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	• Belanja Cetak	100	99,81	127.268.000,-	127.183.400,-	84.600,-	
			• Belanja Penggandaan	100	91,57	26.530.000	26.494.350,-	35.650,-	
			• Belanja Penjilidan	100	91,57	8.952.000	8.944.000,-	8.000,-	
	2.8	Penyediaan komponen instalasi	• Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar)	100	97,74	50.000.000,-	49.999.800,-	200	
	2.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	• Belanja Modal Pengadaan kendaraan roda 2	100	0	75.221.000	60.453.000	14.768.000	
		Kantor	• Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor lainnya	100	0	87.500.000,-	84.939.545	2.560.455.	

			• Belanja Modal Pengadaan meubeler	100	0	31.515.000	24.915.000	6.600.000	
			• Belanja Modal Pengadaan alat pembersih	100		48.000.000	47.740.000,-	260.000,-	
			• Belanja Modal Pengadaan alat Rumah tangga lainnya	100		4.000.000,-	3.500.000.000	500.000,-	
	2.10	Penyediaan bahan bacaan dan	• Belanja Surat Kabar/Majalah	100	92,64	71.114.000,	36.806.400,-	34.307.600,-	
		Peraturan Perundang-undangan							
	2.11	Penyediaan makanan dan minuman	• Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	66,72	30.000.000,-	20.524.000,-	9.476.000,-	
	2.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	96,73	1.077.271.000	769.965.119	307305.881,-	
3.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur								
	3.1	Penyediaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	• Belanja Modal Pengadaan kendaraan roda 2	100	0	75.221.000	60.453.000	14.768.000	
	3.2	Penyediaan Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas / Operasional	• Belanja penyediaan suku cadang	100	5,29	194.500.000	158.666.120,-	35.833.880	

	3.3	Penyediaan Bahan bakar minyak pelumas/gas kendaraan dinas / Operasional	▪ Belanja bahan bakar Minyak/gas/pelumas	100	5,29	338.100.000.0	233.177.668	104.922.332,00	
	3.4	Penyediaan Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	▪ Belanja Jasa Perpanjangan STNK	100	85,49	75.000.000,-	34.378.200,-	40.621.800	
	3.5	Penyediaan sewa tempat parkir kendaraan dinas/operasional	▪ Belanja Jasa Sewa tempat parkir/uang tambat hanggar sarana mobilitas	100	85,49	40.000.000	38.945.200	1.054.800	
3.6	Penyediaan Jasa Service Peralatan /Perlengkapan kantor		Belanja jasa service Peralatan dan perlengkapan kantor	100	90,00	110.500.000	96.457.096	14.042.904	
3.8	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan/mesin		Belanja Pemeliharaan Peralatan/mesin	100	60,00	19.000.000	18.970.000	30.000,-	
3.9	Penyediaan Pemeliharaan Aset Lainnya		Belanja Pemeliharaan aset lainnya	100	60,00	208.518.000,-	200.738.500	7.779.500,-	
4	Peningkatan Disiplin Aparatur							-	
	4.1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	▪ Belanja Pakaian batik dan PDH	100	98,64	70.000.000	54.978.000	15.022.000	

5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	5.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	• Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100	41,48	45.982.000	29.864.500	16.117.500	
6	Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	6.1	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah	• Belanja Bahan Dekorasi	100		18.750.000	18.650.000	100.000	
	6.2		• Belanja Jasa pihak ketiga	100	100,00	224.000.000,-	213.150.000	10.850.000	
7	Program Penyebaran Informasi Kehumasan dan keprotokolan								
	7.1	Promosi Pembangunan	• Belanja Baliho			24.750,000,-	24.500.000	250	
			JUMLAH	100	94,79	7.533.582.695,-	5.847.254.161	1.686.328.534	

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagai gambaran dan bahan evaluasi pencapaian target kinerja keuangan, data mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Tahun 2017 dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DIJAKARTA
TAHUN 2017

No.	Nomor DPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Output)				Instansi Penanggung Jawab	Lokasi
					T	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.20.05.01	1.20.1.20.03.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		5.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	75.000.000,00	100	99,39	Pengiriman surat menyurat dan dokumen kantor	Surat	0,16	0,16	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	332.000.000,00	100	95,02	Pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon, internet	Rekening	3,23	3,23	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.03	Penyediaan jasa administrasi kantor KEUANGAN	883.785.000,00	100	97,16	Jasa perbaikan peralatan kantor	Jenis	1,06	1,06	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.04	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100.000.000,00	100	99,91	Asuransi gedung Kantor	unit	0,24	0,24	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70.000.000,00	100	99,67	Penyediaan alat kebersihan dan keamanan kantor	orang	3,03	3,03	Badan Penghubung	Jakarta

		5.2.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	100	99,98	Tersedianya Alat tulis kantor	jenis	0,54	0,54	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	50.000.000,00	100	94,90	Barang cetakan dan penggandaan	jenis	0,49	0,49	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000,00	100	97,74	Komponen instalasi listrik gedung kantor	jenis	0,11	0,11	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	206.000.000,-	100	94,21	Jumlah peralatan kantor	jenis	2,39	2,39	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	71.114.000	100	92,64	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	0,27	0,27	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	100	75,16	Penyediaan makanan dan minuman Rapat dilingkungan kantor	Porsi	0,48	0,65	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.01.18	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	1.077.000.000,00	100	96,73	Rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Laporan	3,90	0,32	Badan Penghubung	Jakarta
			Jumlah	4.827.186.413,00								
2		1.20.1.20.05.02	Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
			Pengadaan Kendaraan Dinas	75.221.000.			Tercapainya operasional kantor yang optimal	Unit	0,22	0,22	Badan Penghubung	Jakarta

		5.2.01.19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	274.251.000,00	100	98,74	Mebeleur kantor	unit	0,22	0,22	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	415.993.000,00	100	67,09	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	kegiatan	2,17	2,17	Badan Penghubung	jakarta
		5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor	86.112.000,00	100	67,09	Pemeliharaan peralatan dan perlenkapan kantor	kegiatan	2,17	2,17	Badan Penghubung	jakarta
			Jumlah	1.130.000.000,00								
3		1.20.1.20.05.03	Program Penigkatan Disiplin Aparatur									
		5.2.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya(PDH)	70.000.000,00	100	98,64	Pakaian Dinas Harian	orang	0,48	0,48	Badan Penghubung	Jakarta
			Jumlah	70.000.000,,00								
4		1.20.1.20.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
		5.2.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45.982.000	100	85,18	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan kepada PNS lingkup Biro Perwakilan	Orang	1,52	1,37		
			Jumlah	45.982.000								

5		1.20.1.20.03.13.16.06	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daaerah/Wakil Kepala Daerah/Koordinasi dengan PemProv dengan Pemerintah Pusat dan Daerah									
		5.2.1.01.10	Belanja Bahan Dekorasi	18.500.000	100	86,85	Tercapainya Pelayanan yang maksimal kepada pejabat maupun tamu mess	laporan	0,49	0,43	Badan Penghubung	Jakarta
		5.2.2.03.41	Belanja Pihak Ketiga	224.000.000	100	94,15	Tercapainya Pelayanan yang maksimal kepada pejabat maupun tamu mess	laporan	0,25	0,25	Badan Penghubung	Jakarta
			Jumlah	242.500.000,00								
5		1.20.1.20.03.13.34.05	Program Penyebaran Informasi kehumasan dan Keprotokolan									
		5.2.2.07.02	Belanja Baliho	24.7500.000	100	94,15	Tercapainya Promosi Pembangunan	laporan	0,25	0,25	Badan Penghubung	Jakarta
			Jumlah	367.500.000,00								
			JUMLAH	7.533.582.695	100	95,98			100	55,82		

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2017 pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta tidak terdapat hambatan dan kendala hanya waktu pelaksanaan dalam DPA Perubahan terlalu sedikit sehingga realisasi tidak tercapai secara maksimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Entitas pelaporan keuangan adalah SKPD Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.

B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar Basis Akrua.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

- b. Pendapatan diakui pada saat hak telah **diperoleh** (*earned*) dan beban diakui pada saat kewajiban **timbul** atau sumber daya **dikonsumsi**.

c.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

c.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

A. Aset

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparaturnya maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

a) Kas dan Kas Daerah

- (01) Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas dan Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (02) Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- (03) Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

- (01) Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.
- (02) Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) Piutang

- a) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b) Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- c) Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- d) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- e) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - Klarifikasi piutang menurut umur

- Klarifikasi piutang menurut debitur

3) Persediaan Barang Pakai Habis / Material

- a) Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- c) Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
 - Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
 - Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
 - Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

- b) Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
- (01) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
 - (02) Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- d) Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- e) Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- f) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- g) Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap antara lain terdiri dari :
 - (01) Tanah
 - (02) Jalan dan Jembatan
 - (03) Bangunan Air (irigasi)
 - (04) Instalasi
 - (05) Jaringan
 - (06) Bangunan Gedung
 - (07) Bangunan Monumen
 - (08) Alat-Alat Besar
 - (09) Alat Angkutan
 - (10) Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - (11) Alat Pertanian
 - (12) Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
 - (13) Alat Studio dan Alat Komunikasi
 - (14) Alat-Alat Kedokteran
 - (15) Alat-Alat Laboratorium
 - (16) Buku dan Perpustakaan
 - (17) Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

(18) Hewan Ternak dan Tumbuhan

(19) Alat Keamanan

d) Penjelasan Akun Aset Tetap

➤ Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

➤ Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

➤ Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

➤ Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

➤ Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

➤ Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

➤ Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain

sejenisnya.

➤ **Alat-alat Besar**

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat-alat Angkutan**

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat Bengkel dan Alat Ukur**

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat Pertanian**

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat Studio dan Alat Komunikasi**

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat-alat Kedokteran**

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat-alat Laboratorium**

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Buku dan Perpustakaan**

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Hewan/Ternak dan Tumbuhan**

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

➤ **Alat Keamanan**

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

e) Pengakuan

➤ Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.

➤ Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

➤ Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

f) Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan.

Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

- Jalan dan jambatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jambatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jambatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga

mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

g) Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

h) Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian,

penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.

- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) Dana Cadangan

- (01) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- (02) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- (03) Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- (01) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- (02) **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah

berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

(03) **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

(04) **Lain-Lain Aktiva** adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

a. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar

kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

(01) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo**

merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(02) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(03) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.

- b) Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- c) Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.
- d) Kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2006.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka

Panjang terdiri dari:

- a) **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b) **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c) **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d) **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e) **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f) **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

b. Ekuitas Dana

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

1) Ekuitas Dana Lancar

- a) Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- b) Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- c) Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- d) Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :

- a) **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
- b) **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
- c) **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang

merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.

- d) **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2006. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
- e) **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
- f) **Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

2) **Ekuitas Dana Investasi**

- a) Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- b) Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

3) **Ekuitas Dana Cadangan**

- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
- Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.

- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan diantaranya :
 - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
 - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Biro Perwakilan SETDA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya sesuai struktur APBD SKPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp. 722.400.000,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta berasal dari Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan retribusi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp 722.400.000,00 atau 100,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.670.000.000,00. Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2017 ini pada dasarnya dikarenakan sesuai potensi juga penambahan sistem Web dalam pencatatan tamu mess, sehingga transparan dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2017 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Realisasi TA 2016 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	670.000.000,00	722.400.000,00	100,82%	633.150.000,00
Jumlah		670.000.000,00	722.400.000,00	100,82%	633.150.000,00

2. BELANJA

Rp 7.533.582.695,00

Belanja Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar
 Rp. **7.533.582.695,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp 5.847.254.161,00** atau
 77,62 % dan sisa sebesar Rp. **1.686.328.534** ,- atau 5,21%.

Belanja terdiri atas :

a. Belanja Pegawai Rp 3.491.626.695,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 3.491.626.695,00 dari total
 anggaran SKPD. Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2017
 terealisasi sebesar Rp. 2.634.234.883,00 ,00 Sehingga Sisa Anggaran Rp.
 857.391.812, sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 486.619.975,00.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	s.d 30 Des 2017	31 Desember 2016	%
Belanja Tidak Langsung			
- Gaji Pegawai tidak tetap	476.269.120,00	0,00	-100,00
- Tunjangan Keluarga	94.389.858,00	0,00	-100,00
- Tunjangan Jabatan	50.625.000,00	0,00	-100,00
- Tunjangan Fungsional	33..570.000,00	0,00	#DIV/0!
- Tunjangan Umum	0,00	0,00	-100,00
- Tunjangan Beras	57.573.900,00	0,00	-100,00
- Tunjangan PPh/Khusus	18.831.265,00	0,00	-100,00
- Pembulatan Gaji	13.319,00	0,00	-100,00
- Iuran Asuransi Kesehatan	24.655.705,00	0,00	-100,00
- Tambahan Penghasilan berdasar beban kerja	511.500.000,00	0,00	-100,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas	349.500.000,00	0,00	-100,00
- Tambahan Penghasilan Uang makan	104.100.000,00	0,00	-100,00
- Honorarium PNS Non PNS	60.120.000,00 521.844..000,00	0,00	-100,00
Jumlah	2.634.234.883,00	0,00	-100,00

b. Belanja Barang dan Jasa **Rp 3.772.735.000,00**

Belanja barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. **3.772.735.000,00** atau 78,74 % dari total anggaran SKPD. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. **2.970.473.733,00** atau 78,74% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 802.261.267,00 atau 2,76%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 2.833.804.043,00.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2017			31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	234.500.000	233.193.800	97,08	136.753.250,00	-2,92
-	Belanja Jasa Kantor	751.614.000	534.826.422	71,77	396.825.853,00	-9,50
-	Belanja Premi Asuransi	100.000.000	69.343528	62,01	67.238.666	759,08
-	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	718.100.000	522.679.084	89,22	402.879.832	220,04
-	Belanja Cetak dan Pengandaan	162.750.000	162.621.750	82,39	94.315.000,00	-53,94
-	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	40.000.000	38.945.200	75,40	320.264.000	-5,09
-	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000	20.524.000	58,18	2.450.000,00	-93,43
-	Belanja Pakaian Dinas dan atributnya	70.000.000,00	54.978.000	0,00	0,00	-100,00
-	Belanja Perjalanan Dinas	1.077.000.000,00	769.965.119	99,04	1.062.893.292	-76,38
-	Belanja Kursus Pelatihan sosialisasi dan Bimtek PNS	45.982.000,00	29.864.500	100,00	24.455.900	17,44
-	Belanja Pemeliharaan	542.518.000,00	533.532.600	0,00	325.728.250	0,00
-	Jumlah	2.970.473.733,-		42,73	3.320.424.018	-47,86

1) Belanja Pakai Habis Kantor Rp 233.193.800,00

Belanja Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar Rp, 233.193.800,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. **233.193.800,00** atau 97,97 %. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 444.090.160,00.Rincian obyek realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

2) **Belanja Jasa Kantor** **Rp 751.614.000,00**

Belanja Jasa kantor dianggarkan sebesar Rp. 751.614.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp.**534.826.422,00** atau 95,81 %. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.140.797.500,00. Rincian obyek realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017			31 Desember 2015	Naik/Turun (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
- Belanja Telepon	60,300,000.00	56,057,817.00	92.96%	63,710,548.00	-12.01%
- Belanja Air	5,000,000.00	4,259,542.00	85.19%	767,350.00	455.10%
- Belanja Listrik	258,000,000.00	220,665,694.00	85.53%	238,213,939.00	-7.37%
Belanja Surat Kabar	55,440,000.00	46,298,800.00	0.00%	57,392,400.00	-19.33%
- Belanja Paket/Pengiriman	25,000,000.00	24,982,000.00	99.93%	60,150,000.00	-58.47%
- Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan	34,562,000.00	34,562,000.00	100.00%	20,475,000.00	0.00%
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	13,500,000.00	-25.93%
Jumlah	448,302,000.00	396,825,853.00	88.52%	454,209,237.00	-12.63%

3) **Belanja Premi Asuransi** **Rp 100.000.000,00**

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. **69.343.258,00** atau 45,93%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. **67.238.666,00** Rincian obyek realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2017			31 Desember 2016	Naik/Turun (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	100,000,000.00	69,343,258.00	69.34%	67,250,000.00	3.11%
Jumlah	100,000,000.00	69,343,258.00	69.34%	67,250,000.00	3.11%

4) **Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor** **Rp 718.100.000,00**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp. 718.100.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi sebesar Rp. **534.826.422,00** atau 72.79%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. **402.879.832,00** Rincian obyek realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Bahan Bakar	338,100,000.00	233,177,668.00	68.97%	342,300,000.00	-31.88%
- Minyak/Gas dan Pelumas					
- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	75,000,000.00	34,378,200.00	45.84%	45,005,800.00	-23.61%
Jumlah	718,100,000.00	522,679,084.00	72.79%	519,268,270.00	0.66%

5) Belanja Cetak dan Penggandaan **Rp. 162.750.000,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 162.750.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. **162.621.750,00** sisa Rp.128.250 atau 99%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. **94.315.000,00**. Rincian obyek realisasi belanja barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

-	Belanja Cetak	127,268,000.00	127,183,400.00	99.93%	24,690,000.00	415.12%
-	Belanja Penggandaan	26,530,000.00	26,494,350.00	99.87%	64,822,675.00	-59.13%
-	Belanja Penjilidan	8,952,000.00	8,944,000.00	99.91%	64,822,675.00	-86.20%
Jumlah		162,750,000.00	162,621,750.00	99.92%	154,335,350.00	5.37%
					154.335.350.00	

6) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp 40.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00 atau 0,46% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. **38.945.200,00** atau 99,93% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.054.800,00 atau 1,07%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat kenaikan realisasi

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.**320.264.000,00** Rincian realisasi Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2016			31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40,000,000.00	38,945,200.00	97.36	40,975,000.00	-0.05
Jumlah		40,000,000.00	38,945,200.00	97.36	#REF!	#REF!

7) **Belanja Makanan dan Minuman Rp. 30.000.000,00**

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 atau 10% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp **20.524.000,00** atau 100 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 947.600,00atau 11,36%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat kenaikan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp 2.450.000,00. Rincian realisasi Belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2016			31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,000,000.00	20,524,000.00	68.41	23,271,000.00	-0.12
Jumlah		30,000,000.00	20,524,000.00	68.41	23,271,000.00	-0.12

8) **Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp 70.000.000,00**

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dianggarkan sebesar Rp 70.000.000,00 atau 0,0% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp. **54.978.000,00** atau sebesar Rp0,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.022.000,00 atau 20%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat penurunan realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp 0,00. Rincian realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	(%)
-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	70,000,000.00	54,978,000.00	78.54	43,560,000.00	0.26
Jumlah		70,000,000.00	54,978,000.00	78.54	#REF!	#REF!

9) Belanja Perjalanan Dinas **Rp.1.077.271.000,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 1.077.271.000,00 atau 97,98% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp **769.965.119 ,00** atau 98,66% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 307.305.881,00 atau 3,34%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat kenaikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. **1.062.893.292 ,00**. Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2017			31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Perajalan Dinas dalam Daerah				-	#DIV/0!
-	Belanja Perajalan Dinas luar Daerah	1,077,271,000.00	769,965,119.00	71.47	1,059,149,921.00	-0.27
Jumlah		1,077,271,000.00	769,965,119.00	71.47	1,059,149,921.00	-0.27

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Rp . 29.864.500,00

Belanja Kursus/ Bimbingan Teknis dianggarkan sebesar Rp 45.982.000,00 atau 1,49% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar **Rp . 29.864.500,00** atau 67 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 16.117.500,00 atau 0 %. Dibandingkan tahun 2016 terdapat penurunan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebesar **24.455.900,00,00%**. Rincian realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2017			31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	45,982,000.00	29,864,500.00	64.95	60,000,000.00	-50.23
Jumlah		45,982,000.00	29,864,500.00	64.95	60,000,000.00	-50.23

10) Belanja Pemeliharaan **Rp 542.518.000,00**

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 542.518.000,00 atau 1,23% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp **533.532.600,00** atau 99,74% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 898.5400,00 atau 9,26%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat penurunan realisasi

Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. **325.728.250,00** . Perbandingan rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

-	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	19,000,000.00	18,970,000.00	99.84	278,615,000.00	-93.19
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	315,000,000.00	313,824,100.00	99.63	-	
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	208,518,000.00	200,738,500.00	96.27	-	
Jumlah		542,518,000.00	533,532,600.00	98.34	278,615,000.00	91.49

11) Belanja Honorarium PNS Rp69.720.000,00

Belanja Honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp **69.720.000,00** atau 8,96% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasikan sebesar **Rp60.720.000,00** atau % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 atau 0,9%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat penurunan kenaikan realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp. 72.000.000,00. Perbandingan rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Tahun 2016			31 Desember 2015 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	69,750,000,000.00	60,720,000.00	0.09	95,100,000.00	-36.15
Jumlah		69,750,000,000.00	60,720,000.00	0.09	95,100,000.00	-36.15

12) Belanja Honorarium Non PNS Rp 521.884.000,00

Belanja Honorarium Non PNS dianggarkan sebesar Rp.**521.844.000,00** atau 2,94% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasikan sebesar Rp. **Rp 476.269.120,00** atau 90% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.45.574.880,00. Dibandingkan tahun 2016 terdapat Peningkatan realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar **417.619.975,00** **atau** 10%. Perbandingan rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)	(%)	
Belanja honorarium pegawai honorer/ Tidak tetap	521,844,000.00	476,269,120.00	91.27	259,200,000.00	83.75	
Jumlah	521,844,000.00	476,269,120.00	91.27	259,200,000.00	83.75	

c. **Belanja Modal** **Rp 269.221.000,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp **269.221.000,00** atau 2,46% dari total anggaran SKPD. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp **242.454.545,00** atau 56,87% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 3.134,00 atau 4,13%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp**784.696.000,00**. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal pada tahun 2017 sebesar 30% jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	(Rp)
	Belanja Tanah				
-	Belanja Peralatan dan Mesin	269,221,000.00	242,454,545.00	90.06	1,031,205,610.00
	Jumlah	269,221,000.00	242,454,545.00	90.06	1,031,205,610.00

d. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** **Rp 269.221.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 269.221 .000,00 atau 2,46% dari total anggaran belanja modal Jasa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp **242.454.545,00** atau 99,87%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. **784.696.000**.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alatbesar darat/Kendaraan roda dua	75,221,000.00	60,453,000.00	80.37%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa Air	87,500,000.00	84,939,545.00	97.07%
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan mebeleuir	31,515,000.00	24,915,000.00	79.06%
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Alat Pembersih)	48,000,000.00	47,740,000.00	99.46%
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alat rumah tangga lainnya (setrika)	4,000,000.00	3,500,000.00	87.50%
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alat komputer printer	5,500,000.00	5,000,000.00	90.91%
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alat jaringan komputer	6,500,000.00	6,000,000.00	92.31%
- Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alat studio (Handy cam)	10,985,000.00	9,998,000.00	91.02%
Jumlah	269,221,000.00	242,545,545.00	90.09%

**e. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin
(pengadaan Kendaraan Dinas /Angkutan Darat bermotor) Roda 2
Rp 60 453.000, 00.**

Belanja Belanja Modal Pengadaan **Peralatan dan mesin (pengadaan Kendraan Dinas /Angkutan Darat bermotor** sebesar Rp. **60 .453.000.000,00** atau 6,03 % dari total Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. **60. 453.000, 00** atau 52,80 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00 atau 2,20%. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp **565.230.000, 00** .

Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Kendaraan Dinas /Angkutan Darat bermotor Roda Dua pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat **Kendraan Dinas /Angkutan Darat bermotor** pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat-alat **Kendaraan Dinas /Angkutan Darat bermotor** berupa:

No	Uraian	Merk/Type	Jlh	Harga Satuan	Harga Perolehan	Nilai (Rp)
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	Honda Vario 150	3	20.151.000,-	20.151.000,-	60.453.000,-
	Jumlah					60.453.000,-

a) Pengadaan Peralatan dan mesin (Pompa Air dan Sumber Air)

Rp 87.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan peralatan kantor dan Rumah tangga lainnya dianggarkan sebesar Rp **87.500.000,00** atau 8,44 % dari total Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp **84.939.545,00** atau 92%. Sedangkan realisasi 84.939.545,- tahun 2016 sebesar Rp26.350.000,00.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan Kantor Badan penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

Uraian	Tahun 2017			31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Pompa Air)	87,500,000.00	84,939,545.00	92%	26,350,000.00	222.35
Jumlah	87,500,000.00	84,939,545.00	92%	26,350,000.00	222.35

Belanja Modal Alat Rumah tangga lainnya berupa:

No	Uraian	Merk/Type	Jlh	Harga Satuan	Harga Perolehan	Nilai (Rp)
1	Karpet		1 paket	31.515.000	24.915.000	24.915.000
2	Mesin Cuci	LG 21 Kg	2 Buah	17.000.000	4.340.000	38.340.000
3	Vacum Cleaner	Elektroluks	4 Buah	2.350.000		9.400.000
4	Setrika	Philips	5 Buah	700.000		3.500.000
	Jumlah					76.155.000

b) Pengadaan Peralatan dan Mesin (Alat alat Komunikasi) Rp 9.998.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat alat bantu dianggarkan sebesar Rp 9.998.000,00 atau 37,45% dari total Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp 9.998.000,00 atau 100 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,00 atau 0 %. Sedangkan realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 22.720.000,00.

Uraian		Tahun 2017			31 Desember 2016 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Handycam	10.985.000	9.998.000	95%	86,500,000.00	
Jumlah		-	9.998.001	95%	86,500,000.00	

Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat alat komunikasi dan strudio pada tahun 2017 sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2) Kas Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,00. Untuk Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah. saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan bukti BAP Pemeriksaan Kas terlampir Sedangkan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0,00 Berupa bunga Bank ,Sehingga perbandingan

Kas di Bendahara Pengeluaran posisi per 31 Desember 2017 dan per 31

Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2017 adalah Rp. 0,00

3) Piutang Lain-lain Rp 0,00

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2017 Rp **41.116.423,00 Yang berupa Pembayaran Pemakaian Listrik , Air Dan Internet pada bulan Desember 2017 sudah dibayarkan .sedangkan piutang tahun 2016 sebesar 23.625.958,00**

Uraian		31-Dec-17	31-Dec-16
pembayaran listrik	R p	37,396,247.00	
pembayaran air	R p	96,433.00	
pembayaran telepone	R p	3,623,743.00	
	R p		
	R p		
Jumlah		41.116.423.00	-

.

4) Persediaan Rp 7.273.500. ,00

Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.273.500,00 (sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Per 31 Desember 2017 Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Persediaan Alat Tulis Kantor, Peralatan dan Bahan Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga, Barang Logistik, Alat Listrik dan Elektronik, Barang Kegiatan PPTK, barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor. Daftar Persediaan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran. Sedangkan nilai persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 49.015.300,00. Perbandingan Persediaan posisi per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 disajikan sebagai berikut:

Uraian		31-Dec-17	31-Dec-16
Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	3.832.500,00	427.800,00
komponen instalasi listrik	Rp.	2.286.000,00	
Peralatan Kebersihan dan Alat	Rp.	1.155.000,00	
Peralatan Rumah	Rp.		
Tanpa/pakai habis lainnya			
Barang persediaan lainnya	Rp.		48.587.500,00
Jumlah		7.273.500,00	49.015.300,00

5) **Beban Dibayar di Muka Rp 6.566.379,00**

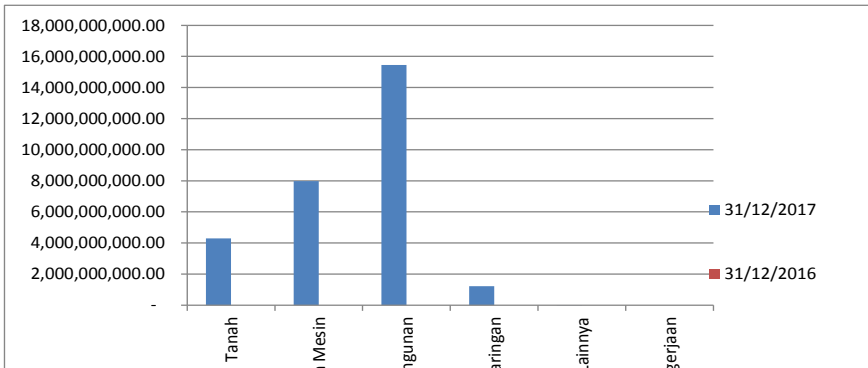
Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 6.566.379,00. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp 14.347.582,50 Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

b. **ASET TETAP Rp. 22.323.094.880,00**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 23.965.686.908,00** sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. **23.727.295.947,00** Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

	Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	penyusutan	(Rp)	
Tanah		4,290,000,000.00				4,290,000,000.00	
Peralatan dan Mesin	242,454,545.00	7,735,742,186.00			-	7,978,196,731.00	
Gedung dan Bangunan		15,448,067,408.00	-	-	-	15,448,067,408.00	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1,215,199,875.00	-	-	-	1,215,199,875.00	
Aset Tetap Lainnya	-	15,340,000.00		-	-	15,340,000.00	
Konstruksi dalam Pengerjaan		0				-	
Akumulasi Penyusutan		4,977,053,522.12					
Jumlah	242,454,545.00	28,704,349,469.00	-	-	-	28,946,804,014.00	

Uraian	Aset Tetap Per 31/12/2017	Aset Tetap Per 31/12/2016
Tanah	4,290,000,000.00	
Peralatan dan Mesin	7,978,287,731.12	
Gedung dan Bangunan	15,448,067,408.00	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,215,199,875.00	
Aset Tetap Lainnya	15,340,000.00	
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	
Jumlah	28,946,895,014.12	



1) Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.290.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp Rp. 4.290.000.000,00 Tidak ada mutasi perubahan Tanah.

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 1 Januari 2017 (a)	Rp	4.290.000.000,00-
<u>Penambahan:</u>		
- Pembelian	Rp	-
- Transfer masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan kode rekening 5.2.2.)	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
Jumlah (b)	Rp	-
<u>Pengurangan</u>		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/penurunan (b-c)	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017 (a+(b-c))	Rp	4.290.000.000,00

Tidak ada penambahan tanah sampai dengan 31 Desember 2017.

2) **Peralatan dan mesin**

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 7.978.287.731,12 sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 7.735.742.186,12

Mutasi perubahan Peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 1 Januari 2017 (a)	Rp	7.735.742.186,12
<u>Penambahan</u>		
- Pembelian	Rp	242.545.545,00
- Mutasi Masuk	Rp	0,00
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan kode rekening 5.2.2.)	Rp	0,00
- Pengembangan	Rp	0,00

- Koreksi masuk	Rp	0,00
- Pengalihan (masuk)	Rp	0,00
<i>Jumlah (b)</i>	<i>Rp</i>	
<i>Pengurangan</i>		
- Penjualan	Rp	0,00
- Pengalihan (keluar)	Rp	0,00
- Penghapusan		0,00
- Reklasifikasi keluar		0,00
- Koreksi Nilai keluar	Rp	
<i>Jumlah (c)</i>	<i>Rp</i>	0,00
Kenaikan /penurunan (b-c)	Rp	
Saldo per 31 Desember 2017 (a+(b-c))	Rp	7.978.287.731,12

- Penambahan peralatan dan Mesin dari:**
 Penyesuaian tambah peralatan dan mesin pada akhir tahun 2017 berjumlah Rp. 242.454.545,00 terdiri dari:
- Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.172.094.545,-
 - kendaraan roda 2 sebesar Rp 60.453.000,-
 - alat Komunikasi Rp. 9.998.000,-.
 - Alat Keamanan Rp. 6.600.000,-

Realisasi Belanja Modal mesin dan Peralatan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

vacum cleaner	Rp	9,400,000.00
setrika	Rp	3,500,000.00
printer	Rp	5,000,000.00
jaringan wifi	Rp	6,000,000.00
handy cam	Rp	9,998,000.00
karpets	Rp	24,915,000.00
Jumlah	Rp	242,546,485.00

Secara rinci nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dapat dijelaskan pada KIB B sebagaimana terlampir.

3)

Gedung dan Bangunan

Rp 15.448.067.408,00

Secara rinci perbandingan nilai dan Mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2015 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2016 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Gedung dan Bangunan Lainnya	15,269,167,408.00	-	178,900,000.00	-	-	15,448,067,408.00
Jumlah	15,269,167,408.00	-	15,269,167,408.00	-	-	15,448,067,408.00

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 15. 448.067.408,00, sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 15. 448.067.408,00, . Gedung Bangunan terdiri dari Rp. 10.777.799.825 Mutasi dari PU SKGub nomor :188.44/498/2015,Rp 4.317.249.623, mutasi dari Kantor Perwakilan dan RP, 174.117.960 Reklas dari Alat kantor dan rumah tangga dari Belanja Modal serta penambahan belanja di luar belanja modal pemasangan kaca di mess cut nyak dien sebesar Rp. 178.900.000,00 ditahun 2016.

4)

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 1.215.199.875,00

Jalan irigasi dan Jaringan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.215.199.875,00, terdiri dari Mutasi PU dengan SK Nomor : 188.44/498/2015 ,sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.215.199.875,00 .Mutasi perubahan Jalan irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo 31/12/2015 (Rp)	Mutasi				Saldo 30/06/2016 (Rp)
	Tambah		Kurang		
	Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Korek si (Rp)	Penghapus an	
2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
1.215.199.875,00	-		-	-	1.215.199.875,00
-	-		-	-	-
1.215.199.875,00	-		-	-	1.215.199.875,00

Tidak ada tambahan untuk irigasi, Jalan dan Instalasi di tahun 2017.

5)

Aset Tetap Lainnya

Rp 15.340.000,00

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 15.340.000,00 sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 15.340.000,00 Mutasi perubahan Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2015 (Rp)	Mutasi				Saldo 30/06/2016(Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Barang Bercorak budaya	15.340.000,00		-	-	-	15.340.000,00
	-		-	-	-	-
Jumlah	15.340.000,00		-	-	-	15.340.000,00

Tidak ada Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2017, Aset Tetap Lainnya terdapat barang bercorak budaya diantaranya :

Talawang Rp. 9.000.000,00

Bingkai Foto Rp.1.400.000,00

Lambang Kalimantan Rp. 4.940.000,00

6)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah Rp 4..977.053.522,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP). .

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada Tabel, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan terlampir pada Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

1	Peralatan dan Mesin	Rp	7,735,742,186.12	Rp	2,413,510,875.00	Rp	5,122,231,311.00
2	Gedung dan Bangunan	Rp	15,448,067,408.00	Rp	2,231,895,993.00	Rp	13,216,171,415.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1,215,199,875.00	Rp	131,646,654.00	Rp	1,083,553,221.00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp	15,340,000.00	Rp	-	Rp	15,340,000.00
Akumulasi Penyusutan		Rp	24,414,349,469.12	Rp	4,777,053,522.00	Rp	19,437,295,947.00

c. ASET LAINNYA

Aset Lainnya yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 desember 2017 adalah sebesar 309.084.322,93 sedangkan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 113.593.697,93 . Mutasi perubahan Aset Lainnya Dikarenakan adanya penghapusan barang dalam kondisi rusak berat dengan SK penghapusan nomor :188.44/522/asset/tgl 29 oktober 2015 dengan perician sebagai berikut:

S Saldo awal per 31 Desember 2018	R p	148,403,505.00
Penam b a h a n :		
- P e m b e l i a n	R p	-
- T r a n s f e r M a s u k	R p	-
- K o r e k s i N i l a i (k a p i t a l i s a s i n i l a i p e r o l e h a n (M A K 52))	R p	-
- P e n g e m b a n g a n	R p	-
- R e k l a s i f i k a s i M a s u k	R p	-
- P e n g a l i h a n (m a s u k)	R p	-
J u m l a h (b)		
P e n g u r a n g a n :		
- T r a n s f e r K e l u a r	R p	-
- R e k l a s i f i k a s i K e l u a r	R p	-
- P e n g a l i h a n (k e l u a r)		
- K o r e k s i N i l a i	R p	-
J u m l a h (c)	R p	-
K e n a i k a n / P e n u r u n a n (b - c)	R p	-
Saldo Per 31 Desember 2016 (a+ (b-c))	R p	148,403,505.00

4. KEWAJIBAN **Rp. 5.124.854.161,00,-**

Kewajiban terdiri dari :

- a) Kewajiban Jangka Panjang lainnya adalah 0,00
- b) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya adalah Rp. 5.148.480.119,00

5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana terdiri atas :

1. Ekuitas Dana Lancar **Rp. 24.086.554.106,60**

Saldo Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Uang Muka dari Kas Daerah dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
Cadangan Piutang	Rp	24.086.554.106,60
Cadangan Persediaan	Rp	7.273.500,00
Uang Muka dari Kas Daerah	Rp	0,00
Dana yg harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp	0,00
Saldo Ekuitas Dana Lancar	Rp	24.093.827.606.60

2. Ekuitas Dana Investasi **Rp. 0,00**

Saldo Dana Investasi merupakan selisih antara diinvestasikan dalam aset tetap dan diinvestasikan dalam aset lainnya dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp	0,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp	-
Dana yg harus disediakan untuk pemby Utang Jangka Panjang	Rp	-
Saldo ekuitas Dana Investasi	Rp	0,00

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

a. PENDAPATAN (LO)

Jumlah Pendapatan- LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 722.400.000,00. Pendapatan - LO tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, yaitu Pendapatan Retribusi Daerah .
Rincian Pendapatan - LO pada Biro Perwakilan Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	722.400.000,00	633.127.094,00
		0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	722.400.000,00	633.127.094,00

b. BEBAN

Rp. 7.346.253.980,62

Saldo Beban Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. **7.346.253.980,62**, Komposisi Beban Operasi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun%
1-	Beban Pegawai- Lo		486.619.975,00	2.147.614.908,00	
		2.634.234.883,00		-	441,33
2	Beban Barang dan Jasa	3.061.113.159,50	2.772.283.547,83	288.829.611,67	10,42
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.650.905.938,12	1.628.629.172,07	22.276.766,05	1,37
4	Beban persediaan	513.059.350,	917.600,00		
5	Beban pemeliharaan	1.070.559.266,50	556.213.082.83		
6	Beban perjalanan dinas	769.965.119	1.062,893.292		
	JUMLAH	5.637.172.040,50	4.888.450.294,90		

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri atas :

a. **Beban Barang dan Jasa**

Rp. .2.634.234.883,-

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. .
2.634.234.883,-

Beban Barang dan Jasa terdiri atas :

a.1. Beban Barang Pakai Habis Rp. 233.193.800,-

Beban barang pakai habis adalah beban berupa konsumsi barang pakai habis (persediaan). Beban barang pakai habis dicatat sebesar pemakaian persediaan. Beban barang pakai habis dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah barang pakai habis pada awal periode per 1 Januari 2017 adalah sebesar 49.015.300,- dan dikeluarkan sebesar Rp. **760.886.788,-** ditambah realisasi Pembelanjaan Rp. **719.094.988,- sehingga** beban barang pakai habis sebesar **Rp. 7.273.500,-** Terdapat selisih jumlah belanja dan jumlah beban senilai **Rp. 7.273.500,-** yang menjadi sisa persediaan barang pakai habis pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 49.015.300,- pada akhir periode Tahun 2016.

R					
URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.814.625,-	24.292.350,-	25.679.175.00	427.800,-	Pada awal periode terdapat sisa persediaan sebesar Rp.161.664.000,- dan pada akhir periode terdapat sisa persediaan sebesar Rp.40.015.300,00-
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	714.000,-	29.905.500,-	30.619.500,-	0.00,-	-
Beban Bahan Dekorasi	0.00,-	34.500.000,-	34.500.000,-	0.00,-	-
Beban Bahan Kbersihan dan pembersih	1.855.975.00,-	48.055.400,-	49.911.375,-	0.00,-	-
Beban Persediaan Beban Pakai habis lainnya	151.647.400,	0,00	103.059.900,-	48.587.500	
JUMLAH BEBAN PAKAI HABIS	156.032.000,-	136.753.250,-	243.769.950,-	49.015.300	

Beban Pakai habis adalah sebagai berikut :

a.2 Beban Jasa Kantor Rp. 534.826.422,00,-

Beban jasa kantor adalah beban berupa konsumsi jasa selama periode berjalan. Beban jasa dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

Rincian Beban Jasa Kantor adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
				-
Beban Jasa Telepon	33.345.189	33.345.189	(1.623.360.00),-	-
Beban Jasa Air	1.665.496	1.665.496	76.804.00,-	
Beban Jasa Listrik	191.470.232	191.470.232	3.321.502.00,-	
Beban Jasa Surat Kabar	36.806.400	36.806.400	0.00,-	
Beban Jasa Paket Pengiriman	15.617.105	15.617.105	0.00,-	
Beban Jasa Pihak ketiga	213.150	213.150	0.00,-	
Beban Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.772.000	42.772.000	0.00,-	
JUMLAH BEBAN JASA	396.825.853,-	395.050.907,-	1.774.946,00	-

Beban barang perlengkapan Kantor berupa aplikasi WEB Badan Penghubung sebesar Rp. **199.650.000,-** adalah penganggaran pada Belanja Modal ditahun 2017 yang di reklaas kepada belanja asset lainnya atau tak berwujud.

Rincian Beban Bahan Perlengkapan Kantor adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	148.403.505,-	199.650.000,-	199.650.000,-	0,00,-
JUMLAH BEBAN JASA	148.403.505,-	199.650.000,-	199.650.000,-	0.00,-

Jumlah belanja cetak dan penggandaan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan

Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar **162.621.750,00,-** sedangkan beban sewa cetak dan penggandaan sebesar Rp. 97.697.750,00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. **3.382.750.00,-** Jumlah tersebut adalah saldo awal per 1 Januari 2017 dan sudah dikeluarkan sehingga jumlah realisasi dan beban adalah Rp.0,00

Rincian Beban Cetak dan Penggandaan adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL(RP)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Cetak	3.381.250	70.755.000.00,-	74.136.250.00,-	0.00,-	-
Beban Penggandaan	1.500	23.560.000.00,-	23.561.500.00,-	0.00,-	-
JUMLAH BEBAN JASA	3.382.750	94.315.000.00,-	97.697.750.00,-	0.00,-	-

a.5 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah **Rp. 69.343.259,-**

Jumlah Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.67.238.666,00,- sedangkan beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp. 67.238.666,00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Realisasi dan Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Jasa Asuransi	67.238.666.00,-	67.238.666.00,-	0.00,-	-
				-
JUMLAH BEBAN JASA ASURANSI	67.238.666.00	67.238.666.00	0.00,-	-

a.6 Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Rp. 522.679.084.00,-**

Jumlah Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.402.879.832,00,-

sedangkan beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor sebesar Rp. **409.384.832,00,-** Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. **6.505.000,00,-** nilai tersebut adalah salah memasukkan rekening jasa service ke Suku Cadang sebesar Rp. 1.646.850,00.

Rincian Realisasi dan Beban Pemeliharaan Kendraan Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Jasa servive	17.992.504.00,-	19.639.354.00,-	1.646.850,00,-	-
Suku Cadang	36.853.828,00	35.206.978,00	(1.646.850,00)	-
Bahan Bakar	315.350.000,00	315.350.000,00	0,00	
STNK	32.683.500,00	39.188.500,00	6.505.000,00	
JUMLAH BEBAN KENDARAAN DINAS	402.879.832.00	409.384.832.00	6.505.000,00,-	-

a.7. Beban Sewa Rumah/Gedung

Rp. 38.945.200,00,-

Jumlah belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **320.264.000 ,-** sedangkan beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir sebesar Rp. **320.264.000,-** Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	307.424.000,-	307.424.000,-	0.00,-	-
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.840.000,-	12.840.000,-	0.00,-	-
JUMLAH BEBAN SEWA GEDUNG/PARKIR	320.264.000.00,-	320.264.000.00,-	0.00,-	-

a.8. Beban Makanan dan Minuman

Rp. 20.524.000,-

Jumlah belanja makanan dan minuman pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **2.450.000,00,-** sedangkan beban makanan dan minuman sebesar Rp. **2.450.000,-** Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Makanan dan Minuman adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.

Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000	2.450.000	0.00,-	-
JUMLAH BEBAN MAKAN DAN MINUM	2.450.000	2.450.000	0.00,-	-

a.9. Beban Perjalanan Dinas

Rp. 769.965.119.00,-

Beban perjalanan dinas adalah beban berupa perjalanan dinas selama periode berjalan. Beban perjalanan dinas meliputi beban perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran. Jumlah belanja perjalanan dinas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **1.062.893.292,00,-** sedangkan beban perjalanan dinas sebesar Rp. **1.062.893.292.00,-** Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.062.893.292,-	1.062.893.292,-	0.00,-	-
JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	1.062.893.292	1.062.893.292	0.00,-	-

a.10. Beban Pemeliharaan

Rp. 533.532.600,00,-

Jumlah belanja Pemeliharaan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **325.728.250** ,- sedangkan beban Pemeliharaan sebesar Rp. **146.828.250,00-**

Rincian Realisasi dan Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET .
Beban Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.800.000,00,-	17800.000,00	0.00,-	-
Beban Pemeliharaan Gedung	274.205.250,00-	95.305.250,00	178.900.000.00,-	-
Beban Aset Tetap lainnya	33.723.000,00	33.723.000,00	0,00	
JUMLAH BEBAN PEMELHARAAN	320.264.000.00,-	320.264.000.00,-	178.900.000,00	-

a. 11 Beban Bimbingan Teknis

Rp. 29.864.500,00,-

Jumlah belanja Bimtek pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **24.455.900,00** ,- sedangkan beban Bimtek sebesar Rp.**24.455.900,00**,00- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. **0,00**-

Rincian Realisasi dan Beban Bimbingan Teknis Pegawai adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET
Bimbingan Teknis Pegawai	24.455.900,00	24.455.900,00	0,00	-
JUMLAH BEBAN BMTEK	24.455.900,00	24.455.900,00	0,00	-

a.12 Beban Honorarium PNS **Rp. 60.720.000.00,-**

Jumlah belanja honorarium PNS pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.**72.000.000.00**,00,- sedangkan beban honorarium PNS sebesar Rp. **72.000.000,00**,00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp.0.00,-

Rincian Beban Honorarium PNS adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang	72.000.000	72.000.000	0.00,-	-
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	72.000.000	72.000.000	0.00,-	-

a.13. Beban Honorarium Non PNS **Rp. 476.269.120.00,-**

Jumlah belanja honorarium non PNS pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **414.619.975.00**,00,- sedangkan beban honorarium non PNS sebesar Rp. **414.619.975.00**,00,- Selisih antara jumlah realisasi dan jumlah beban adalah Rp. 0.00,-

Rincian Beban Honorarium Non PNS adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	BEBAN (Rp)	SELISIH REALISASI ANGGARAN DAN BEBAN (Rp)	KET.
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	414.619.975	414.619.975	0.00,-	-
JUMLAH BEBAN PEGAWAI	414.619.975	414.619.975	0.00,-	-

b. Beban Penyusutan **Rp. 6.623.800.134,12.00,-**

Beban penyusutan dan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 1.5589.984.365.00 ,-**

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut :

URAIAN	BEBAN	KET.
Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	443.602.536.00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor	62.031.459.00	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	589.157.911.00	-
Beban Penyusutan Komputer	52.18.708.00	
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Rapat	11.090.400.00	
Beban Penyusutan Alat Studio	41.226.633.00	-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	8.480.00.00	-
Beban Penyusutan Kesehatan	3.100.00.00	
Beban Penyusutan Unitunit Labraturium	377.500.00	
Beban Penyusutan Alat keamanan dan perlindungan	5.120.000.00	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat kerja	308.961.348.00	
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	121.519.988.00	
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN		-

Saldo Beban Pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017

URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016
BEBAN BARANG DAN JASA		
:		
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	25.679.175	38.179.875,00
Beban Persediaan pakai habis lainnya	103.059.900	(147.147.400,00)
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.619.500	48.421.750,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	49.911.375	67.025.050,00
Beban Bahan Dekorasi	34.500.000	67.500.000,00
Beban Jasa Telepon	56.057.817	63.710.548,00
Beban Jasa Air	4.259.542	767.350,00
Beban Jasa Listrik	220.665.694	238.213.939,00
Beban Jasa surat kabar	46.298.800	57.392.400,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	24.982.000	60.150.000,00
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	34.562.000	20.475.000,00
Beban pemeliharaan peralatan mesin	17.800.000	27.150.000,00
Beban pemeliharaan bangunan gedung	95.305.250	225.705.000,00
Beban pemeliharaan aset tetap lainnya	33.723.000	25.760.000,00
Beban Jasa service	19.639.354	49.009.950,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	10.000.000	13.500.000,00
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	67.238.666	40.307.650,00
Beban Penggantian Suku Cadang	35.206.978	82.952.520,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	315.350.000	342.300.000,00
Beban Surat Tanda Nomor	39.188.500	23.235.616,67

URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016
Kendaraan		
Beban Cetak	74.136.250	21.308.750,00
Beban Penggandaan	23.561.500	64.822.675,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	307.424.000	22.620.000,00
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	12.840.000	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000	23.271.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.062.893.292	1.059.149.921,00
Beban Bimbingan Teknis	24.455.900	60.000.000,00
Beban Bahan Habis Pakai Lainnya		0,00
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	2.250.000	0,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	4.300.000,00
Beban Honorarium Pengelola uang dan barang	72.000.000	61.560.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap - LO	414.619.975	309.949.230,00
JUMLAH	3.186.903.522,83	2.952.390.824,67
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI :		
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	443.602.536	170.353.571,43
Beban Penyusutan Alat Kantor	129.769.509	21.296.931,20
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	589.157.991	273.820.543,80
Beban Penyusutan Komputer	52.118.708	22.298.937,50
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.090.400	11.674.400,00
Beban Penyusutan Alat Studio	41.226.633	9.475.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	8.480.000	1.730.000,00
Beban Penyusutan Alat	3.100.000	1.550.000,00

URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016
Kedokteran/kesehatan		
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	703.126	168.750,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.006.667	1.900.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	308.961.548	109.519.177,85
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	0,00	15.189.998,44
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	121.519.988	0,00
Beban Lain lain	0.00	1.917.500
JUMLAH	1.719.737.106,00	684.067.306,45

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN

Rp. 6.623.853.980.50

NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp.0,00 terdiri dri hasil penghapusan barang dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TH 2017	TH 2016
DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR :		
- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin	0,00	582.995.500,
Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional	0,00	582.995.500,

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

5.3.1 Ekuitas Awal **Rp. 23.876.471.986,10**

Nilai ekuitas awal pada per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. **23.876.471.986,10**

5.3.2 Surplus/Defisit – LO **(Rp. 4.914.772.040,50)**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar (Rp. **4.914.772.040,50**) dan jika dibandingka tahun 2016 sebesar Rp. -3.816.832.093,01. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

5.3.3 Ekuitas Akhir **Rp 24.086.554.106,60**

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. **24.086.554.106,60** Nilai ekuitas akhir adalah penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit LO dengan ekuitas awal tahun 2016.

Rincian perubahan ekuitas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Perubahan Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2017		
URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	23.876.471.986,10	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	4.914.772.040,50	4.216.655.487,83

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : - Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	24.086.554.106,60	4.216.655.487,83

BAB VI

**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN**

A. Pengungkapan penting lainnya

Selama Semester I tahun 2017 tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan yang di luar kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Rekening pemerintah

Pada Badan Penghubung Provinsi Kalteng di Jakarta tercatat sebagai nasabah dari Bank BRI Cabang Veteran dengan nomor rekening 032901000002305 an. Kantor Penghubung Pemprov Kalteng.

BAB VII

P E N U T U P

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Akhir Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah Akhir

Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
- 3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta tahun 2017.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Akhir Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2018

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI JAKARTA,**

SAWUN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP 19700101 199303 1 021

DAFTAR LAMPIRAN

--

1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset
2. Register SP2D
3. Surat Tanda Setoran Sisa UYHD
4. Ringkasan dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SIMDA
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 31 Desember 2017.
6. Rekening Koran dari Januari s.d Desember 2017.
7. Buku Kas Umum per 31 Desember 2017
8. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017.
9. Berita Acara inventarisasi Persediaan Barang Pakai Habis dan Rekapitulasi Barang Habis Pakai/Daftar Persediaan per 31 Desember 2017.
10. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F).

LAMP IRAN